

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban berkaitan dengan kinerja lembaga pemerintah selama Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan penerapan/perwujudan dari program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disajikan dalam bentuk informasi mengenai uraian singkat organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama yang dihadapi selama tahun 2023. Disamping itu juga disajikan rencana dan target kinerja yang ditetapkan dalam setiap sasaran atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya yang dijabarkan dengan transparan dan akuntabel.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi acuan kinerja dalam peningkatan realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan pada masa tahun-tahun yang akan datang.

Makassar, Februari 2024
Pih. KEPALA DPMPTSP PROV. SULSEL,

IDHAM KADIR, S.Sos., M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19790113 200003 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
a. Latar Belakang	3
b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
c. Struktur Organisasi	4
d. Kondisi Pegawai	6
Bab II Perencanaan Kinerja	8
a. Perencanaan dalam Renstra 2019-2023	8
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
c. Program, Kegiatan dan Anggaran	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	25
a. Capaian Realisasi Kinerja Berdasarkan RPJMD dan IKU ..	26
b. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan), Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Dana)	27
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	
d. Realisasi Anggaran	51
Bab IV Penutup	53



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), diharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab (akuntabel) serta diharapkan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal di Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah, dengan terbitnya peraturan ini maka diharapkan akan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, dimana sinergitas pelayanan penanaman modal dapat diwujudkan sehingga mampu meningkatkan penyerapan investasi di Sulawesi Selatan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut di atas, DPMPTSP mempunyai fungsi:



- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

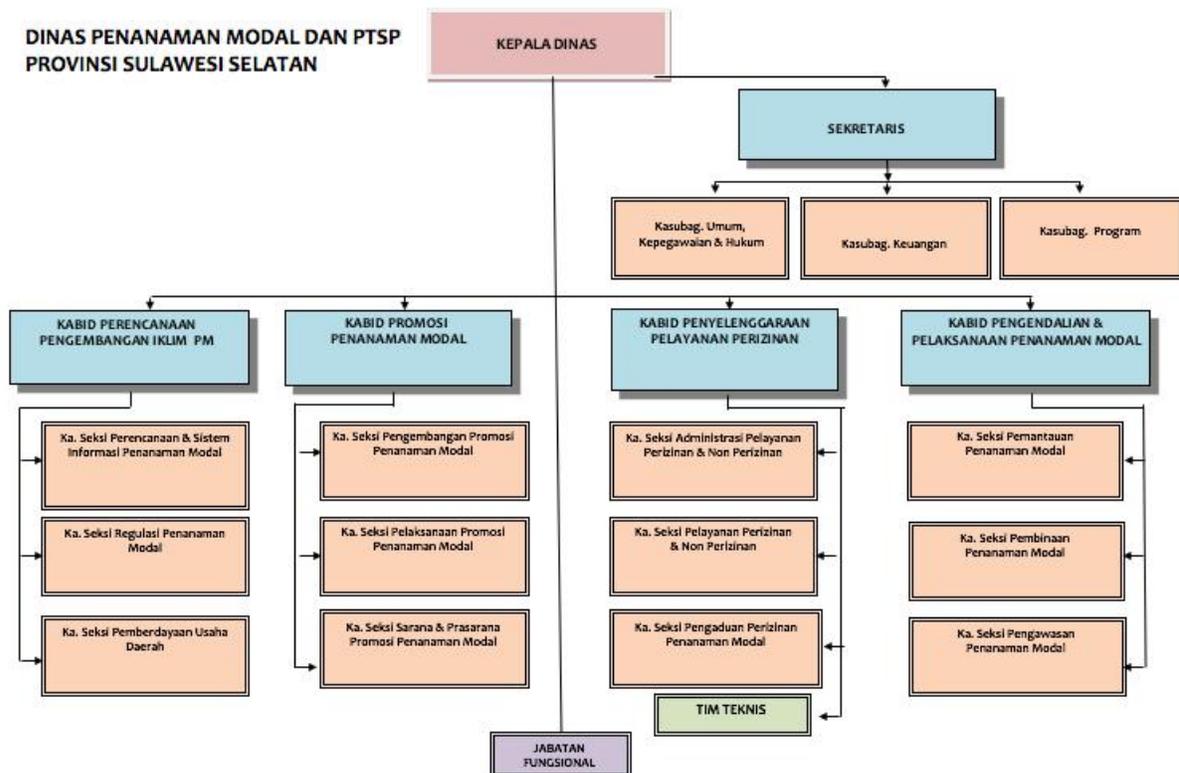
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 2. Seksi Regulasi Penanaman Modal
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal



- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 3. Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pemantauan Penanaman Modal
 2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal
 3. Seksi Pengawasan Penanaman Modal

Struktur Organisasi DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut :





D. KONDISI PEGAWAI

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2023 berjumlah 86 orang, yang terdiri dari 46 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, dan jumlah PTT sebanyak 24 orang, yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Adapun kualifikasi ASN, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usia, 2 orang berusia 26-30 tahun, 9 orang berusia 31-35 tahun, 15 orang berusia 36-40 tahun, 20 orang berusia 41-45 tahun, 18 orang berusia 46-50 tahun, 22 orang berusia di atas 50 tahun, sesuai tabel berikut:

No	Sekretariat/Bidang	Berdasarkan Usia							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	1	2	6	8	7	4	28
2	Bid. Promosi	-	-	2	2	3	1	7	15
3	Bid. Pengembangan	-	-	3	2	4	1	3	13
4	Bid. Dalak	-	-	1	1	4	3	4	13
5	Bid. Pel. Perizinan	-	1	1	4	1	6	4	17
Total		-	2	9	15	20	18	22	86

- b. Berdasarkan Golongan/Ruang, sebanyak 6 orang Golongan II, 64 orang Golongan III dan 16 orang Golongan IV, sesuai tabel berikut:

No	Sekretariat/Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	21	5	28
2	Bid. Promosi	-	3	10	2	15
3	Bid. Pengembangan	-	-	10	3	13
4	Bid. Dalak	-	-	8	5	13
5	Bid. Pel. Perizinan	-	1	15	1	17
Total		-	6	64	16	86



- c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 9 orang berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan D3, 50 orang berpendidikan S1, 25 orang berpendidikan S2 dan tidak ada berpendidikan S3, sesuai tabel berikut:

No	Sekretariat/Bidang	Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	3	1	15	9	-	28
2	Bid. Promosi	3	1	8	3	-	15
3	Bid. Pengembangan	-	-	9	4	-	13
4	Bid. Dalak	1	-	5	7	-	13
5	Bid. Pel. Perizinan	2	-	13	2	-	17
Total		9	2	50	25	-	86

- d. Berdasarkan Jabatan Struktural, terdapat 6 Jabatan struktural, yaitu Pejabat Eselon II 1 orang, Eselon III sebanyak 5, namun yang terisi hanya 5 jabatan, karena 1 orang Pejabat Eselon III di promosikan ke OPD lain pada Tahun 2023 . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	4	4
Total		-	5	5

- e. Berdasarkan Jabatan Fungsional, terdapat 3 Jabatan Fungsional . Tabel Jabatan Fungsional, yaitu: 1 orang Fungsional Perencana, 1 orang Fungsional Penerjemah dan 2 orang Fungsional Arsiparis, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Perencana	-	1	1
2	Penerjemah	1	-	1
3	Arsiparis	1	1	2
Total		2	2	4



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahun periode kepemimpinan kepala daerah terpilih yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan stakeholder serta para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan arah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja Tahun 2019-2023 DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dalam Rencana Strategis DPM PTSP Prov. Sulsel Tahun 2019-2023

1. Visi dan Misi

Untuk berkontribusi pada visi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulsel 2019-2023, DPMPTSP Provinsi Sulsel mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:



“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “

Dalam rumusan visi ini ada 2 (dua) misi yang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijalankan oleh DPMPTSP Prov. Sulsel, yaitu:

- Misi ke-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi melayani dan Inovatif
- Misi ke-3 : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023, dengan demikian berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya.

Tujuan 1: Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

Strategi: 1. Memanfaatkan kewenangan DPMPTSP sebagai pusat perizinan untuk menyediakan Mall Pelayanan Publik; dan 2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal

Kebijakan:

1. Penyediaan Mal Pelayanan Publik
2. Penggunaan pelayanan berbasis IT
3. Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan
4. Penyederhanaan prosedur/SOP perizinan dan non perizinan
5. Mall Pelayanan Publik



Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Strategi:

1. Menyediakan data dan laporan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja OPD

Kebijakan:

1. Menyusun data dan laporan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu
2. Meningkatkan kualitas aparatur yang berkompeten melalui diklat dan bimtek
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Tujuan 3: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya realisasi penanaman modal

Strategi:

1. Melakukan pengembangan promosi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik atau minat investor
2. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi
3. Menyediakan data dan informasi kajian terkait potensi dan peluang investasi secara detail dan komprehensif
4. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal, yaitu kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN

Kebijakan:

1. Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi
2. Melaksanakan pameran potensi dan peluang investasi daerah di dalam dan luar negeri



3. Membuat regulasi/insentif/kebijakan daerah yang dapat mengembangkan iklim penanaman modal
4. Membuat dokumen perencanaan penanaman modal daerah
5. Membuat dokumen kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi
6. Menyediakan data dan informasi bidang penanaman modal yang valid dan kredibel
7. Melaksanakan kegiatan pemantaun untuk memaksimalkan realisasi investasi
8. Melakukan pembinaan perusahaan PMA/PMDN untuk menyelesaikan permasalahan penanaman modal
9. Melakukan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap ketentuan penanaman modal.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Revisi Renstra DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)											
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020				
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.02		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
1.02	12	Penanaman Modal										
1.02	12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				5,498,899,731	5,384,597,232			7,035,793,700	4,931,164,956	
	01	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	11,55	13.02	10.21	391,039,300	386,884,213	7	12.54	134,945,000	133,489,692
	001	Pemantauan perkembangan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau di Kab/Kota	110	10	15	92,424,900	91,745,820	10	11.0	43,905,000	43,885,000
	002	Pembinaan perusahaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi di Kab/Kota	6	5	57	253,750,000	251,006,918	30	144.0	65,000,000	64,089,692
	003	Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Kab/Kota yang di awasi	24	3	5	44,864,400	44,131,475	5	6.0	26,040,000	25,515,000
	02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	911	774	1548	1,076,702,500	1,051,558,888	600	2,506.0	730,585,780	724,887,715
	001	Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri	Jumlah kegiatan pameran dalam negeri yang dilaksanakan	3	2	2	244,081,700	239,782,980	-		-	
	002	Penyelenggaraan Pameran Luar Negeri	Jumlah kegiatan pameran luar negeri yang dilaksanakan		1	1	410,892,300	402,318,880	-		-	
	004	Temu Usaha	Jumlah kegiatan temu usaha yang dilaksanakan untuk membuka peluang investasi di Sulsel	2	1	1	111,978,000	111,074,528	-		-	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)										
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN	
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
007	Pembuatan Sarana Promosi Investasi	Jumlah sarana dan prasarana promosi yang disiapkan	3	1	1	57,005,000	56,606,600	1	1.0	36,224,800	36,214,800
008	Pengembangan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kesepakatan Kerjasama	2	1	2	228,860,000	220,550,400	2	3.0	271,812,535	271,356,969
009	Konsolidasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah konsolidasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1	2	2	23,885,500	21,225,500	-	-	-	-
	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal /Investasi Daerah	1. Jumlah pameran 2. Jumlah temu usaha 3. Jumlah workshop promosi					0	2,1,1	2,1,1	422,548,445	417,315,946
03	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	18	12	7	191,836,100	188,863,919	7		572,507,800	190,688,600
001	Perencanaan dan Pengembangan Sistem informasi potensi penanaman modal	Jumlah website	1	1	1	73,836,000	72,841,719	1	1.0	459,741,800	79,499,100
005	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal		1	1	63,783,100	62,829,200	3	3.0	112,766,000	111,189,500
	Penyusunan Mitra Bisnis Potensial Sulsel	Jumlah Buku		-				-			
007	Pengembangan aparat DPMPTSP Provinsi, Kab/Kota dan Dunia Usaha	Jumlah peserta dari DPM PTSP provinsi/kab/kota dan dunia usaha	400	100	100	54,217,000	53,193,000	-	-	-	
04	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (Persentase)	66%	15%	73%	742,037,827	735,870,748	10%	61%	585,652,600	380,579,300
001	Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		25,000	34005	121,230,727	120,970,727	25,000	24,376	393,850,600	190,269,600
002	Monitoring dan Evaluasi Perizinan yang Diterbitkan	Jumlah Persetujuan Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan		7	7	101,607,100	99,192,350	-			
004	Pengaduan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengaduan penanaman modal	14	24	25	203,585,500	201,384,423	24	104.0	64,997,000	63,954,700



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)										
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN	
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005	Pembinaan dan Pendampingan DPMPSTSP Kabupaten/Kota	Jumlah DPMPSTSP Kab/Kota		3	3	40,603,000	40,370,000	-		-	
006	Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha (Satgas)	Jumlah percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan		30	30	30,006,500	29,814,000	-		-	
003	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	1. Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses 2. Tersedianya Mall Pelayanan Publik 3. Pelayanan Perizinan Mobile di Rest Area		13000,00	34005	245,005,000	244,139,248	13000,00	24,376	126,805,000	126,355,000
50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	75 %	75%	1,931,093,933	1,886,704,635	75 %	75%	2,555,102,820	2,311,085,499
001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	12	12	450,522,733	432,959,485	12	12.0	496,695,520	462,430,218
003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	16	18	18	594,400,000	594,400,000	26	26.0	961,000,000	961,000,000
005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, BarangCetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	120	130	130	288,972,200	286,926,250	130	130.0	185,199,200	160,423,700
006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25	50	50	27974000	19,349,000	34	34.0	25,125,000	25,125,000
008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3	3	3	239,825,000	231,681,000	5	5.0	277,415,000	257,808,000
010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		10	10	329400000	321,388,900	13	13.0	609,668,100	444,298,581
51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran		75 %	75%	730,897,000	708,785,595	75 %	75%	2,246,451,400	981,845,550
004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1	1	1	433,250,000	425,765,547	1	1.0	1,296,358,500	461,255,487



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)												
KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020				
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10	15	15	126,600,000	114,455,760	28	28.0	451,948,900	203,110,000
	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		9	9	171,047,000	168,564,288	48	48.0	498,144,000	317,480,063
	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase ASN berkinerja sangat baik		80 %	80%	129,392,000	122,250,000	80 %	98.75%	18,498,000	18,498,000
	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	80	82	82	129,392,000	122,250,000	83	83.0	18,498,000	18,498,000
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	9	9	9	-		9	9.0	0	0
	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	80	82	82	-		82	-	-	0
	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		70 %	70%	305,901,071	303,679,234	70 %	70%	192,050,300	190,090,600
	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	7	11	11	206,212,040	204,988,884	11	11.0	115,850,200	114,688,000
	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah peserta forum		50	50	16,202,500	15,900,000	50	50.0	25,700,000	24,982,500
	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7	7	7	83,486,531	82,790,350	7	7.0	50,500,100	50,420,100



Tabel T-C.27. (Lanjutan)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
					2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
DPM PTSP						20,483,838,043		21,095,901,611		24,255,796,855		65,835,536,509	
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah				Nilai SAKIP DPM PTSP	A (80.01)		A (82)		AA (90.01)		AA (90.01)		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%	-	
				Persentase Nilai Temuan Material LHP	1%		0,5%		0,1%		0,1%	-	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	16,150,824,123	100%	16,518,378,001	100%	19,405,796,855	100%	52,074,998,979	
				Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%		100%		100%		100%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	347,328,500	100%	387,718,000	100%	494,000,000	100%	1,229,046,500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2	192,328,500	2	200,000,000	2	220,000,000	6	612,328,500	Sulawesi Selatan
				Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1		-		1		2		Sulawesi Selatan
				Jumlah Peserta Forum PD	50		50		50		150		Sulawesi Selatan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	20,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3	92,000,000	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	1		1		1		3		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1	15,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3		Sulawesi Selatan	
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1	15,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3		Sulawesi Selatan	
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1	15,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3		Sulawesi Selatan	
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan	1	50,000,000	1	24,000,000	1	26,000,000	3	100,000,000	Sulawesi Selatan	
				Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1		1		1					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4	40,000,000	4	43,718,000	4	80,000,000	12	163,718,000	Sulawesi Selatan	
				Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	2		2		2		6	-	Sulawesi Selatan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	11,100,000,000	100%	11,093,098,012	100%	12,560,000,000	100%	34,753,098,012		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangannya untuk tiap bulannya selama 1 tahun	84	11,000,000,000	85	11,000,000,000	86	12,410,000,000	86	34,410,000,000	Sulawesi Selatan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	1	100,000,000	1	93,098,012	1	150,000,000	3	343,098,012	Sulawesi Selatan	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100%	10,000,000	100%	7,918,000	100%	12,000,000	100%	29,918,000		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD	1	5,000,000	1	3,959,000	1	6,000,000	3	14,959,000	Sulawesi Selatan	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	5,000,000	1	3,959,000	1	6,000,000	3	14,959,000	Sulawesi Selatan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100%	322,400,000	100%	202,250,200	100%	368,000,000	100%	892,650,200		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
					2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	84	232,400,000	85	100,000,000	86	250,000,000	255	582,400,000	Sulawesi Selatan
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1	50,000,000	1	60,698,200	1	68,000,000	3	178,698,200	Sulawesi Selatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dimonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84	40,000,000	85	41,552,000	86	50,000,000	86	131,552,000	Sulawesi Selatan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	2,027,974,000	100%	1,825,602,100	100%	2,378,296,854	100%	6,231,872,954	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13	32,974,000	13	31,925,000	13	50,000,000	39	114,899,000	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1,200,000,000	10	1,000,000,000	12	1,100,000,000	34	3,300,000,000	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	60,000,000	6	53,677,100	6	72,000,000	6	185,677,100	Sulawesi Selatan
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	5	35,000,000	15	40,000,000	7	50,000,000	27	125,000,000	Sulawesi Selatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	3	700,000,000	3	700,000,000	3	1,106,296,854	3	2,506,296,854	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,691,135,543	100%	1,652,209,616	100%	1,620,000,000	100%	4,963,345,159	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	12	550,000,000	12	558,943,376	12	620,000,000	12	1,728,943,376	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas non ASN (Kebersihan, Keamanan, Administrasi dan Tenaga Pendukung MPP)	30	1,141,135,543	30	1,093,266,240	30	1,000,000,000	30	3,234,401,783	Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	651,986,080	100%	1,349,582,073	100%	1,973,500,001	100%	3,975,068,154	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	150,000,000	15	110,000,000	15	150,000,000	15	410,000,000	Sulawesi Selatan
				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarkan	15		15		15		15	-	Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	5	65,000,000	5	64,750,000	5	123,500,001	15		Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	1	236,986,080	1	677,400,000	1	900,000,000	1	1,814,386,080	Sulawesi Selatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
					2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	18	200,000,000	20	497,432,073	22	800,000,000	60	1,497,432,073	Sulawesi Selatan
Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif				Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	1.8%		2%		3%		3%		
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B (80)		A (82)		A (84)		A (84)		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	80%	1,324,672,696	85%	1,491,000,000	90%	1,500,000,000	90%	4,315,672,696	
			Kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	100	1,324,672,696	100	1,491,000,000	100	1,500,000,000	300	4,315,672,696	
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	25,000	924,672,696	26,000	1,091,000,000	27,000	1,100,000,000	78,000	3,115,672,696	Sulawesi Selatan
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	25,000	200,000,000	26,000	200,000,000	27,000	200,000,000	78,000	600,000,000	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi	200	200,000,000	100	200,000,000	110	200,000,000	410	600,000,000	Sulawesi Selatan
				Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah tindak lanjuti	10		10		10		30	-	Sulawesi Selatan
				Jumlah Pelaksanaan Survey IKM	2		2		2		6	-	Sulawesi Selatan
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan				Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	0%		12,5%		13%		13%		
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Jumlah Realisasi Penanaman Modal (Rp. Triliun)	8		9		10.17		27		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	50%	540,958,712	75%	571,000,000	100%	600,000,000	100%	1,711,958,712	
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	50%	540,958,712	75%	571,000,000	100%	600,000,000	100%	1,711,958,712	
				Persentase penurunan pelanggaran perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	60%	-	65%	-	75%	-	75%	-	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
					2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	50	180,958,712	60	203,234,500	70	200,000,000	180	584,193,212	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP Kab/Kota dalam rangka konsinyering data	24	-	24	-	24	-	24	-	Sulawesi Selatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dibina	50	180,000,000	60	180,000,000	70	200,000,000	180	560,000,000	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP kab/kota terkait pembinaan	24	-	24	-	24	-	24	-	Sulawesi Selatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi	50	180,000,000	60	187,765,500	70	200,000,000	180	567,765,500	Sulawesi Selatan
				Jumlah Rekomendasi yang diberikan	10	-	15	-	20	-	45	-	Sulawesi Selatan
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	3.50	1,447,034,000	4.0	1,640,000,000	4.50	1,800,000,000	12.00	4,887,034,000	
				Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	4.50	-	5.0	-	5.67	-	15.17	-	
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon investor yang masuk	80	1,447,034,000	90	1,640,000,000	100	1,800,000,000	100	4,887,034,000	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	2	447,034,000	1	540,000,000	1	600,000,000	4	1,587,034,000	Dalam dan Luar Negeri
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/dikuti	7	1,000,000,000	2	1,100,000,000	2	1,200,000,000	11	3,300,000,000	Dalam dan Luar Negeri
				Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi	4		4		4		12	-	Sulawesi Selatan
				Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota	24		24		24		24	-	Sulawesi Selatan
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid	80%	784,250,512	90%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	1,334,250,512	
			Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha	100	784,250,512	100	250,000,000	100	300,000,000	100	1,334,250,512	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
					2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola /dikembangkan/dibangun	1	784,250,512	1	250,000,000	1	300,000,000	3	1,334,250,512	Sulawesi Selatan
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh investor	75%	236,098,000	85%	625,523,610	100%	650,000,000	100%	1,511,621,610	
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan	75%	60,000,000	85%	245,000,000	100%	236,000,000	100%	541,000,000	
			Penetapan Kebijakan Daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	1	50,000,000	1	200,000,000	1	186,000,000	3	436,000,000	Sulawesi Selatan
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	1	10,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	3	105,000,000	Sulawesi Selatan
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi provinsi	60%	176,098,000	85%	380,523,610	100%	414,000,000	100%	970,621,610	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang Menyusun RUPM	15	25,000,000	20	50,000,000	25	55,000,000	25	130,000,000	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan	4	151,098,000	4	330,523,610	5	359,000,000	13	840,621,610	Sulawesi Selatan
				Jumlah Mitra Bisnis Potensial Sulsel	4		4		5		13	-	Sulawesi Selatan



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Sebelum masuk pada Perjanjian Kinerja, terlebih dahulu disusun Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU DPMPTSP dibuat dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor: 050/91/II/ DPMPTSP, tanggal 30 Oktober 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel
Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PENGISIAN	KET
Tujuan: Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPMPTSP Prov. Sulsel	Persentase	Persentase peningkatan Nilai IKM $\frac{\text{Tahun N} - \text{Tahun N}(-1)}{\text{Tahun N}(-1)} \times 100\%$	Persentase kenaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsive melalui PTSP dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai IKM	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Survey dilakukan mandiri, diidentifikasi dengan menggunakan 9 unsur/dimensi berdasarkan Menpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tujuan: Persentase Peningkatan Investasi di Prov. Sulsel	Persentase	Persentase peningkatan Total Nilai Realisasi PMA dan PMDN $\frac{\text{Tahun N} - \text{Tahun N}(-1)}{\text{Tahun N}(-1)} \times 100\%$	Persentase kenaikan total nilai realisasi PMA dan PMDN dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sasaran: Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. TRiliun)	Triliun Rupiah	Total jumlah realisasi investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM	Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN



Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja program perangkat daerah	100%	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Rp. 16.805.098.049,-
		Persentase nilai temuan LHP	100%		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsive melalui PTSP dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan public di DPMPSTSP Prov. Sulsel	A	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 442.911.700,-
3	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp. 10.17 Triliun	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 513.390.900,-
				Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 693.588.800,-
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 871.951.000,-
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 13.140.000,-

C. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		16.805.098.049,-
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.797.100,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.671.867.347,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.351.600,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.217.000,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	784.834.300,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.033.030.702,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.000.000,-
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		513.390.900,-
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman	70.377.500,-



	Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	443.013.400,-
3. Program Promosi Penanaman Modal		693.588.800,-
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	693.588.800,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal		442.911.700,-
1	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinai	442.911.700,-
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		871.951.000,-
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	871.951.000,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		13.140.000,-
1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	13.140.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75%	Sedang
4	51% s.d 65%	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$



A. Capaian Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Prov. Sulsel yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Sulsel Nomor: 050/91/II//DPMPTSP, tanggal 30 Oktober 30 Oktober 2020, tentang: Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PENGISIAN	KET
Tujuan: Persentase Peningkatan IKM atas Pelayanan Publik di DPMPTSP Prov. Sulsel	Persentase	Persentase peningkatan Nilai IKM $\frac{\text{Tahun N} - \text{Tahun N}(-1)}{\text{Tahun N}(-1)} \times 100\%$	Persentase kenaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan responsive melalui PTSP dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai IKM	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Survey dilakukan mandiri, diidentifikasi dengan menggunakan 9 unsur/dimensi berdasarkan Menpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tujuan: Persentase Peningkatan Investasi di Prov. Sulsel	Persentase	Persentase peningkatan Total Nilai Realisasi PMA dan PMDN $\frac{\text{Tahun N} - \text{Tahun N}(-1)}{\text{Tahun N}(-1)} \times 100\%$	Persentase kenaikan total nilai realisasi PMA dan PMDN dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sasaran: Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. TRiliun)	Triliun Rupiah	Total jumlah realisasi investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM	Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Adapun Capaian target IKU DPMPTSP Prov. Sulsel yang memiliki 2 Sasaran dengan Indikator yaitu:

1. Sasaran 1: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik. Formulasi pengukuran adalah hasil survey indeks kepuasan masyarakat (Nilai IKM), yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada setiap semester. Survey ini dilakukan secara mandiri, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang



Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Pelayanan Publik. Target IKM untuk Tahun 2023 adalah Nilai 84 (A), dan dapat direalisasi dengan dilai 85,93 (A), atau 102%.

2. Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal, dengan formulasi pengukuran Jumlah akumulasi realisasi PMA dan PMDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM setiap Triwulan. Target Realisasi Investasi Tahun 2023 yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Sulsel adalah sebesar Rp. 10,17 Triliun, dan dapat direalisasi sebesar Rp.16,45 Triliun, atau sebesar 161% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 2023 dan target RPJMD dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Tahun 2023 dan Target RPJMD

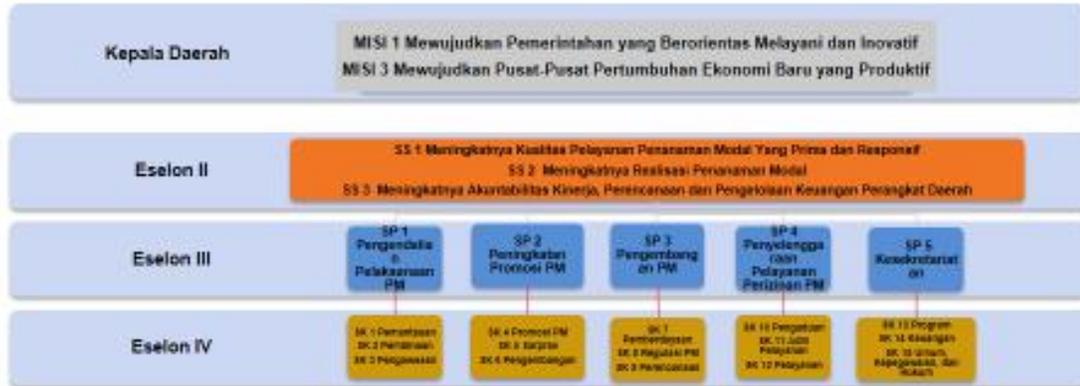
No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Capaian RPJMD 2019 s/d 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	A (82,81)	A (84)	A (82,81)	98,6%	A (84)	A (82,81)	98,6%
2	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 14,2 T	Rp. 10,17 T	Rp. 16,45 T	161%	Rp.49,92T	Rp.44,95 T	90%

B. CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

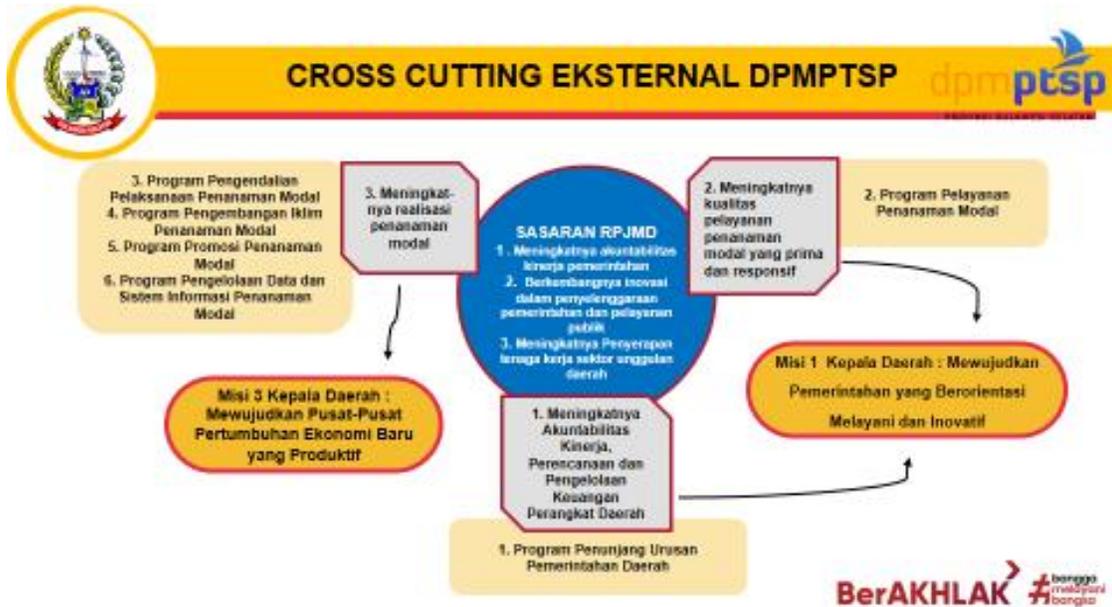
Berdasarkan Pohon Kinerja (Cascading) yang merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis, sasaran DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:



CASCADING DPMPTSP

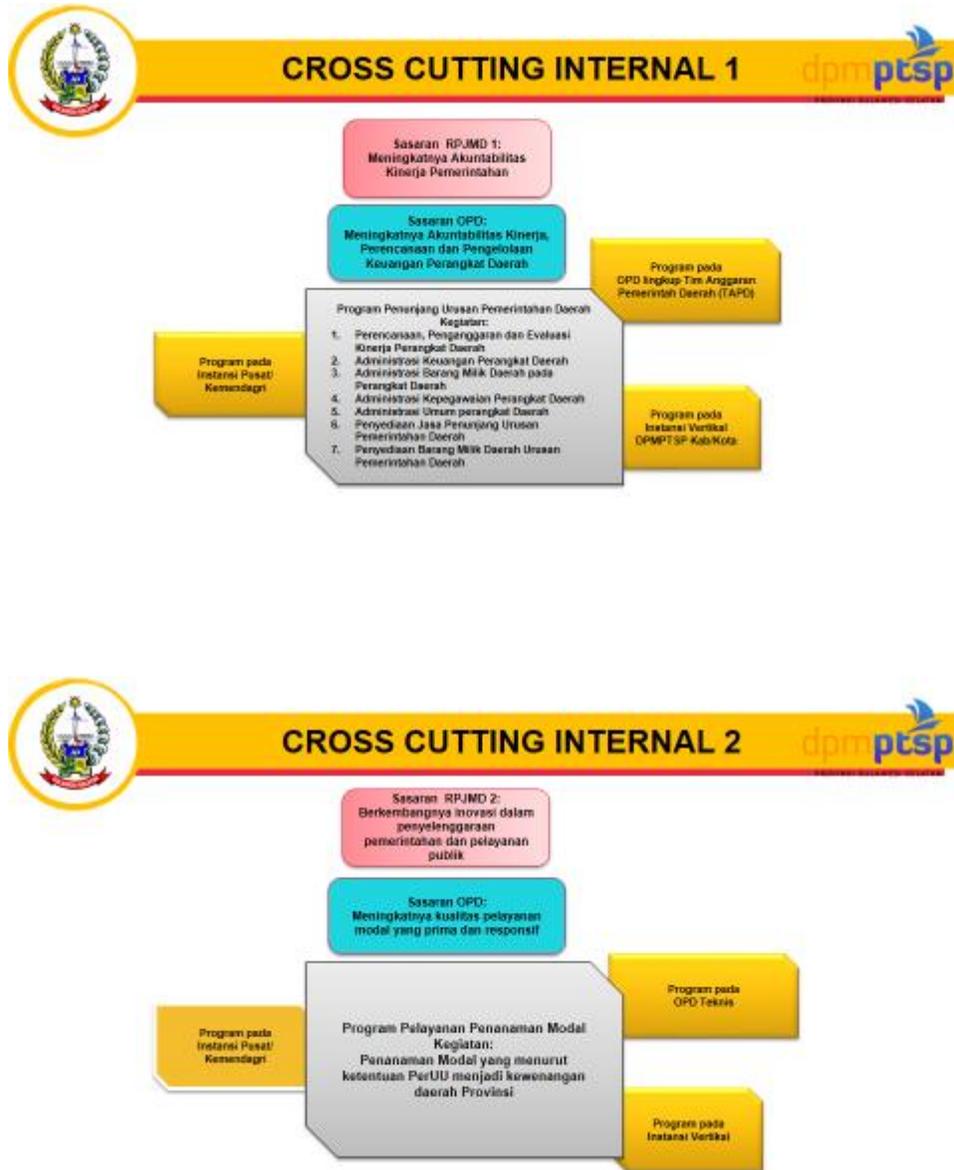


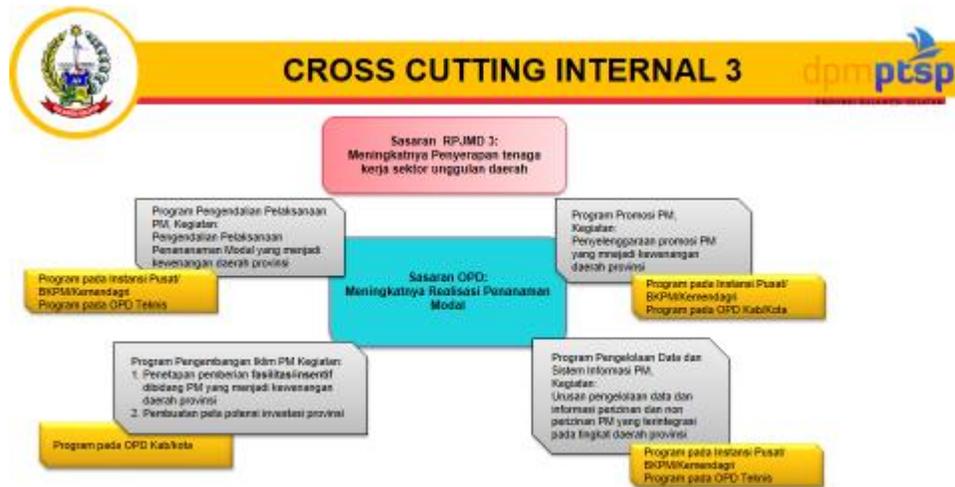
Cross Cutting Eksternal DPMPTSP, dapat dilihat pada gambar berikut:





sedangkan untuk Cross Cutting internal DPMPTSP dapat dilihat pada 3 gambar berikut:





Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, sesuai Tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Tabel T-C 25 pada Renstra Perubahan Tahun 2019-2023)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Urusan Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Nilai SAKIP DPMPTSP Prov. Sulsel	BB (70,02)	BB (72,00)	A (80,01)	A (82,00)	AA (90,01)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase nilai temuan material LHP	-	-	1%	0,5%	0,1%
2	Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciprakan iklim penanaman modal yang kondusif		Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di DPMPTSP Prov. Sulsel	1%	1,5%	1,8%	2%	3%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di DPMPTSP Prov. Sulsel	B (75)	B (77)	B (80)	A (82)	A (84)
3	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan		Persentase peningkatan investasi di Prov. Sulsel	-12%	23%	0	12,5%	13%
		Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal (Triliun Rupiah)	10,21	12,54	8	9	10,17



Pencapaian dari penjabaran kinerja tersebut berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, pencapaian dari target tersebut dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TUJUAN 1

Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

SASARAN 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

1) Perbandingan Target dan Realisasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	AA (90,01)	A (80,60)	89,54%
Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Persentase Temuan BPK	0%	0%	100%

Pada tujuan Nilai SAKIP dengan target AA dengan poin 90,01, dapat direalisasi dengan Nilai A poin 80,60 atau capaian sebesar 89,54%.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, untuk perbandingan antara target dan realisasi pada indikator tujuan dan sasaran, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah, dengan target 100% di Tahun 2023 dan dapat direalisasi sebesar 100%.
- Persentase Temuan Material BPK, dari target 0 dapat direalisasi sebesar 0%.



2) Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya

Tujuan	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75,24 (BB)	80,45 (A)	80,60 (A)
Sasaran	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	89,54%
	Persentase Temuan BPK	0%	0%	0%

Pada Tujuan Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah, capaian Nilai SAKIP OPD tahun 2023 mencapai 80,60 (A), meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai Nilai 80,45 (A).

Pada sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, untuk perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022, yaitu:

- Presentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah, pada tahun 2022 mencapai 100% dan pada Tahun 2023 mencapai 89,54%.
- Persentase Temuan Material BPK, tahun ini mencapai 0% dari target sebesar 0%. Artinya pada pemeriksaan laporan keuangan tidak terdapat temuan oleh BPK.

3) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Periode Terakhir Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2023	Target Capaian Akhir Renstra
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	A (80,60)	AA (90,01)
Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target Capaian Akhir Renstra
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	89,54%
	Persentase Temuan BPK	0%	0%



Pada indikator Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, capaian Tahun 2023 mencapai nilai 80,60 dengan Nilai A, sedangkan target Tahun 2023 pada nilai AA (90,01) atau mencapai sekitar 89,54% dari target Renstra.

Pada capaian sasaran, meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dengan indikator sasaran:

- Persentase capaian kinerja program perangkat daerah mencapai 100% dan target RPJMD sebesar 100%
- Persentase temuan Material BPK, untuk tahun mencapai Nilai 0%, sedangkan Target Capaian Tahun Terakhir Renstra sebesar 0%.

4) Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2023	Target Nasional
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	A	-
Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target Nasional
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%
	Persentase Temuan BPK	0%	-

Tidak terdapat Target Nasional untuk Indikator Tujuan Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah maupun Indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang dilakukan

Pada peningkatan Nilai SAKIP DPMPSTP dari Tahun ketahun, mulai dari Tahun 2020 mencapai Nilai 72,0 (BB) dan meningkat lagi di Tahun 2021 dengan Nilai 75,24 (BB) di Tahun 2022 dengan nilai 80,45 (A) dan pada Tahun 2023 mencapai Nilai 80,60 (A). Hal ini tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan, juga tidak lepas dari asistensi dan perbaikan yang terus dilakukan oleh Biro Organisasi dengan menghadirkan Tim Kemenpan RB yang langsung mengasistensi mulai dari perbaikan perencanaan (Renstra) sampai pada perbaikan indikator perencanaan berikut dengan formulasi pengukurannya. Hal ini juga tidak lepas dari asistensi dan perbaikan yang



dilakukan oleh Inspektorat Prov. Sulsel dengan menyandingkan dokumen perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan.

Secara umum pencapaian target dan sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor, sehingga terlaksananya proses pengelolaan administrasi umum persuratan, administrasi kepegawaian serta pengelolaan administrasi barang serta sarana dan prasarana kantor yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparat DPMPTSP, berikutnya adalah kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur DPMPTSP. Capaian kinerja dapat dilihat pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.221 Surat masuk, 1.324 Surat keluar, Jumlah ASN yang naik pangkat sebanyak 25 orang dan Jumlah Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ASN sebanyak 44 orang. Selain itu juga didukung oleh tersusunnya pengadministrasian keuangan yang baik dalam mendukung setiap pelaksanaan program dan kegiatan, serta keikutsertaan aparat lingkup DPMPTSP dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional, yang diadakan lembaga di tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk meningkatkan kinerja dan wawasan aparat dalam melaksanakan tupoksinya serta dapat membangun karakter yang produktif dan profesional dalam melaksanakan pelayanan khususnya kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Sulawesi Selatan.

6) Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.340.080.449,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 17.595.071.303,- atau 90,98%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 9,02%.



No	Program	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.340.080.449,-	Rp. 17.595.071.303,-	90,98%

7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TUJUAN 2

Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif

SASARAN 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif, dengan capaian sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Persentase
Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik	3%	1,25	41,7%
Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas	A (84)	A (85,93)	102%



publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	pelayanan publik			
---	------------------	--	--	--

Pada tujuan Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, dengan target indikator sebesar 3%, namun dapat direalisasi 1,25% atau 41,7 % dari target tahun 2023.

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive, dengan target indikator IKM A (84), dapat direalisasi dengan nilai A (85,93) atau 102%. Penilaian ini dilakukan secara mandiri berdasarkan MenpaN-RB Nomor 14 tahun 2017 Tahun 2023.

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun sebelumnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Capaian 2023
Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik	-0,2%	1,25%
Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Capaian 2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82,81	85,93

Pada Tujuan Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan Indikator tujuan Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik capaian Tahun 2022 menurun sebesar 0,2% dan Tahun 2023 meningkat sebesar 3,77%.

Pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive dengan Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pada Tahun 2022 dengan nilai 82,81 dan Tahun 2023 mencapai nilai 85,93.

3) Analisis Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Periode Terakhir Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2023	Target Akhir Renstra
Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik	1,25%	3%
Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target Akhir



			Renstra
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	A (85,93)	A (84)

Pada Tujuan Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan indikator Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik telah terjadi kenaikan sebesar 3,77% dari Tahun 2022.

Pada Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive dengan Indikator IKM, telah dicapai Nilai A (85,93), atau telah mencapai 102% dari target akhir Renstra dengan Nilai A (84).

4) Analisis Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Nasional

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2023	Target Nasional
Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik	1,25%	-
Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Target Nasional
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	85,93	-

Tidak terdapat Target Nasional untuk Indikator Tujuan, yaitu Persentase Peningkatan IKM Atas Pelayanan Publik maupun Indikator Sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan beserta solusinya

Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 85,93 atau 102% dari target, berdasarkan pengolahan hasil survey dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode



semester II berada pada angka 85,93, naik sekitar 0,12 angka jika dibandingkan dengan periode semester I yang berada pada angka 85,81 namun masih berada pada kategori BAIK.

- b. Aspek pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah aspek biaya pelayanan dengan nilai indeks 94,17%, sementara aspek yang paling rendah dengan angka 81,67% adalah aspek waktu.
- c. Seluruh dimensi pelayanan sudah berada pada angka diatas 80. Sedangkan unsur Biaya/tarif Pelayanan dan unsur Penanganan Pengaduan mencapai angka di atas 90 atau berada pada kategori A.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, maka untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ada, maka beberapa kegiatan/program yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Mempertahankan segala aspek pelayanan yang sudah baik, dan dilakukan peningkatan sehingga tingkat kepuasannya bisa berada pada kategori A atau sangat baik.
- b. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses pelayanan perizinan, sehingga dapat diketahui faktor yang sering menjadi penghambat dalam penerbitan izin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- c. Perlu dilakukan peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan/bimtek terhadap petugas pelayanan terkait kebijakan terbaru penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- d. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar waktu pelayanan untuk setiap jenis perizinan.
- e. Perlu dilakukan evaluasi terkait User Experience aplikasi perizinan online DPMP TSP Prov. Sulawesi Selatan, sehingga dapat diketahui hal apa saja yang sering menjadi kendala masyarakat dalam penggunaan aplikasi.



Dukungan dari sisi regulasi, Pada Tahun 2023 Telah terbit Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Dan Non Perizinan. Telah terbit Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penilaian, dan Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi Pada Tahun 2023:

Permasalahan yang berhubungan dengan proses penyeleksian IPRO dimana ada di temukan lahan atau lokasi proyek yang belum memenuhi syarat untuk di promosikan akan tetapi proyek tsb termasuk yang proyek strategis pemerintah daerah, susah nya menyediakan lahan yang clean and clear kadang menjadi faktor utama terkandanya proyek IPRO. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan konsultasi pada pakar IPRO dari pusat melibatkan DPMPTSP dan kab/kota terkait, serta pihak penyelenggara (bank indonesia), pemerintah diwajibkan menerbitkan Perda terkait lahan yg akan di jadikan lokasi proyek IPRO agar menyakinkan masuknya para investor. Belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh sebagian besar OPD yang memiliki perizinan dan non perizinan. Solusi yang dilakukan adalah segera melakukan koordinasi agar OPD yang memiliki perizinan dan non perizinan segera menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Masih adanya pelaku usaha yang belum pernah menyampaikan LKPM nya karena ketidaktahuan perubahan penginputan dari OSS.1 ke OSS RBA. Solusi yang dilakukan adalah bimbingan langsung ke pelaku usaha tentang perubahan tersebut.

Beberapa capaian kinerja DPM PTSP Tahun 2023, yaitu:

- Mendapatkan Penghargaan ANUGERAH LAYANAN INVESTASI (ALI 2023) sebagai 5 besar atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari Kementerian INVESTASI RI.



- Hasil evaluasi atas capaian dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada DPMPTSP Tahun 2022 mendapatkan nilai 80,60 dengan kategori Predikat A (Memuaskan).
- Nilai capaian MCP KPK RI di tahun 2023 pada area intervensi Perizinan telah mencapai 100% kategori:
 - a. Transparansi dan Akuntabilitas 100%
 - b. Sarana dan Prasarana 100%
 - c. Kemudahan Perizinan 100%
 - d. Pengendalian dan Pengawasan 100%

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Program Pelayanan penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 442.911.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 370.495.871,- atau 83,65%, sehingga tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 16,35%.

No	Program	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	442.911.700,-	370.495.871,-	83.65

7) Analisis Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

Adapun Program dan Kegiatan capaian setiap indikator kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Adapun realisasi pelayanan izin dan non izin yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Sektor	Perizinan	Nonperizinan	Aplikasi Perizinan
--	--------	-----------	--------------	--------------------



No.				
1	Penanaman Modal	-	-	OSS-RBA
2	Koperasi dan UMKM	-	-	OSS-RBA
3	Sosial	-	51	ProPTSP, SIMPPSDBS
4	Kelautan Perikanan	-	-	SIMKADA, OSS dan ProPTSP
5	Perhubungan	-	1001	OSS-RBA dan ProPTSP
6	Peternakan	1257	-	OSS-RBA dan ProPTSP
7	Ketenagakerjaan	-	-	OSS-RBA
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	9	OSS-RBA dan ProPTSP
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	18	13	OSS-RBA dan ProPTSP
10	Kesehatan	9	431	OSS-RBA dan ProPTSP
11	Pendidikan	199	58	OSS dan ProPTSP
12	Kehutanan	5	15	OSS RBA dan ProPTSP
13	Lingkungan Hidup	10	-	OSS-RBA dan ProPTSP
14	Perdagangan	-	1	OSS ProPTSP
15	Ketahanan Pangan	0	8	OSS-RBA dan ProPTSP
16	Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	-	-	OSS-RBA
17	Kesatuan Bangsa Politik	-	155	ProPTSP
18	Penelitian dan Pengembangan	-	23.827	NENI Si LINCA
19	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	OSS-RBA dan ProPTSP
20	Perindustrian	-	-	OSS-RBA
21	Bina Marga dan Knstruksi	21	-	ProPTSP
		1.531	25.569	Total 27.100

*) Data berdasarkan rekapitulasi dari sistem OSS, PROPTSP, NENI Si LINCA dan SIMKADA per tanggal 31 Desember 2023

Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan pada DPMPSTSP Prov. Sulsel dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebanyak 27.100 dokumen, yaitu 1.531 Perizinan dan 25.569 Non Perizinan pada 20 sektor/OPD. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA) dan Perizinan Daerah melalui Aplikasi Mandisi, dengan jumlah layanan sebanyak 84 jenis layanan, yang terdiri dari 47 jenis perizinan dan 37 Jenis Non perizinan dari 21 Sektor.

TUJUAN 3

Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan



SASARAN 3

Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan capaian sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Persentase
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	13	15,4%	118%
Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	10,17	16,451	161%

Pada Tujuan Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator persentase peningkatan realisasi investasi, Target peningkatan realisasi investasi dari Tahun 2023 sebesar 13% dan dapat direalisasi kenaikan sebesar 15,4%.

Pada sasaran Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator realisasi investasi sebesar Rp.10,17 Triliun, dan dapat direalisasi sebesar Rp.16,451 Triliun atau sebesar 161% dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD.

2) Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun Sebelumnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	-14,4%	15,4%
Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 14,25 T	Rp. 16,45 T

Pada tujuan Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan pada tahun 2023 terjadi nilai realisasi investasi sebesar 161%, nilai ini telah melampaui target RPJMD yang hanya sebesar Rp. 10,17 T.

Pada sasaran Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan target indikator sasaran nilai realisasi investasi, pada tahun 2022 mencapai Rp.14,25 Triliun, dan pada



tahun 2023 realisasi mencapai Rp.16,45 Triliun, hal ini mengalami peningkatan sebesar 15,4% dari tahun 2022, dan nilai ini juga telah melampaui target RPJMD yaitu sebesar Rp. 10,17 T dan dapat dicapai sebesar Rp.16,45 T atau sebesar 161,7% dari target RPJMD.

3) Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Periode Terakhir Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	15,4%	13%
Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 16,451 T	Rp. 10,17 T

Pada tujuan Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan dicapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi, target Renstra sebesar 13%, namun capaian kenaikannya sebesar 15,45% atau mencapai 118% dari target Renstra.

Pada Sasaran Meningkatkan realisasi investasi, dengan indikator realisasi PMA dan PMDN untuk tahun 2023 sebesar Rp. 16,45 T dari capaian akhir RPJMD yaitu sebesar Rp.10,17 T atau mencapai 161% dari Target Renstra.

4) Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	15,4%	-
Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 16,45T	Rp. 14,55 T

Tidak terdapat target nasional untuk indikator Tujuan Persentase Peningkatan Realisasi Investasi. Sedangkan Target Nasional untuk Indikator Sasaran Total



Nilai Realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16,45 Triliun, atau mencapai sebesar 113 % dari target nasional.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang dilakukan

Target realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yaitu Rp. 10,17 Triliun atau sebesar 161% dari target RPJMD yaitu sebesar Rp.16,45 Triliun. Keberhasilan ini tidak ini tidak luput dari program yang ikut mendukung, yaitu:

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, telah diterbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat atau investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontraproduktif karena banyaknya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal. Untuk itu Perda dibuat sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau investor, yang dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Prov. Sulsel tepat sasaran dan tercapainya pemerataan di Prov. Sulsel serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, Pada Tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penilaian, dan Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi. Kemudian Laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal sejauh ini belum dilaksanakan evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2021, baru sampai pada tahap pelaksanaan sosialisasi Perda.
- **Program Promosi Penanaman Modal**, Kegiatan Seminar Bisnis, Forum One on One Meeting yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :



1. Bimtek Penyusunan IPRO PM, Hotel Claro Makassar, dilaksanakan pada tanggal 21 - 24 Februari 2023
2. *South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2023* di Four Points Hotel by Seraton Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023
3. *South Sulawesi Investment Forum (SSIF) 2023* di Hotel Claro Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023.

Kemudian Pameran Penanaman Modal pada Tahun 2023, Pekan Raya Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 3 September 2023. Selain itu juga dilaksanakan 4 kali Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal, yaitu menerima Kunjungan Kepala Kantor Konsulat Australia di Makassar pada tanggal 12 Juli 2023; Kunjungan *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* pada tanggal 13 Juli 2023; Kunjungan Kepala Kantor Konsulat Jepang di Makassar pada tanggal 7 September 2023; Kunjungan duta Besar Perancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN pada tanggal 20 Desember 2023. Melalui kesempatan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap agar kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal yang dilaksanakan 4 kali tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan pada capaian realisasi investasi di Sulawesi Selatan.

- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,** Telah dilaksanakan Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN terkait pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal :
 1. Kegiatan alokasi pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
 2. Pengawasan perusahaan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 33 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
 3. Pembinaan perusahaan melalui bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal serta bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan



berusaha berbasis resiko dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dengan jumlah peserta sebanyak 385 perusahaan penanaman modal yang terdiri dari 370 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 15 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

- **Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**, Telah dilakukan kegiatan untuk sinergitas terhadap data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terintegrasi secara elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP). Telah dilakukan pekerjaan Rancang Bangunan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online berbasis IOS dan Android serta Web, merupakan modul untuk mobile yang dapat di download berbentuk aplikasi pada sistem operasi mobile ios untuk para pengguna apple production dan sistem operasi android yang digunakan pada mobile yang lainnya, aplikasi ini dapat di download pada app store untuk ios dan play store untuk android diperangkat masing-masing para pengguna. Aplikasi ini digunakan oleh para pelaku usaha yang akan melakukan permohonan izin yang ada pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi selatan, yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan yang dikelola oleh para petugas izin yang ada pada dinas terkait, sehingga para pelaku usaha yang telah melakukan permohonan izin dapat memonitoring dengan mudah izin yang telah di daftar melalui aplikasi ini.

Tabel dan Grafik Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2018 s/d 2023

NO	TAHUN	PMA				PMDN				TOTAL PMA+PMDN
		PROYEK	TKI	TKA	NILAI (Rp.)	PROYEK	TKI	TKA	NILAI (Rp.)	Rp.
1	2018	371	9,903	143	8,270,320,540,000	540	6,267	2	3,275,876,300,000	11,546,196,840,000
2	2019	506	1,280	32	4,539,207,000,000	1042	9,942	7	5,672,574,400,000	10,211,781,400,000
3	2020	525	1,433	237	3,399,189,120,000	1,981	4,704	4	9,142,047,500,000	12,541,236,620,000



4	2021	659	5,064	515	4,525,349,029,800	3,847	11,051	9	12,075,383,700,000	16,600,732,729,800
5	2022	572	2.610	141	6,730,190,295,000	5.173	10.264	20	7.527.989.300.000	14.258.179.595.000
6	2023	1.271	2.424	160	4,983,332,853,879	14.118	16.545	57	11,468,311,600,000	16,451,644,453,879

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 6 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dimana realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 11,54 triliun, menurun pada Tahun 2019 menjadi Rp.10,21 Triliun dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi Rp.12,5 Triliun dan meningkat menjadi Rp. 16,6 Triliun di Tahun 2021 dan Tahun 2022 mencapai Rp. 14,2 Triliun pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp. 16,45 Triliun.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini terdiri dari 4 Program, dengan anggaran sebesar Rp.2.092.070.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.1.612.147.571,- atau sebesar 77 %, sehingga tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 23 %.

No	Program	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	513,390,900,-	269,751,395,-	52,54
2	Program Promosi Penanaman Modal	693,588,800,-	606,615,720,-	87,47
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	871,951,000,-	722,640,456,-	82,88
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	13,140,000,-	13,140,000,-	100
	Total	2.092.070.700,-	1.612.147.571,-	77

7) Analisis Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:



- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Capaian pelaksanaan 4 Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Indikator Program	Capaian Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	85%	85%	100%
2	Promosi Penanaman Modal	jumlah realisasi PMA dan PMDN	Rp.10,17T	Rp.16,45 T	161%
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	75%	75%	100%
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	100%	100%	100%

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan indikator persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor, dengan target 85% dan realisasi tercapai 85%.



2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan indikator jumlah realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 10,17 Triliun, dan dapat direalisasi sebesar Rp.16,54 Triliun atau sebesar 161% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal, dengan target 75%, dan dapat direalisasi 75%.
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indikator persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal, dengan target 100% dan dapat direalisasi sebesar 100%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

D. REALISASI ANGGARAN

Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 19.340.080.449,00,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 17.595.071.303,00,- atau sebesar 90,97%, yang membiayai 6 Program dan 13 Kegiatan.

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (7)	16.805.098.049,-	15.612.377.861,-	92,90
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.797.100,-	381.014.547,-	90,76
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.671.867.347,-	12.523.011.039,-	98,83
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.351.600,-	10.288.800,-	99,39
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.217.000,-	48.214.000,-	36,74
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	784.834.300,-	532.030.169,-	67,79
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.033.030.702,-	1.897.029.056,-	95,96
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.000.000,-	220.790.250,-	29,28



2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		513.390.900,-	269.751.395,-	52,54
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	70.377.500,-	56.029.860,-	79,61
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi provinsi	443.013.400,-	213.721.535,-	48,24
3. Program Promosi Penanaman Modal		693.588.800,-	606.665.720,-	87,47
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	693.588.800,-	606.665.720,-	87,47
4. Program Pelayanan Penanaman Modal		442.911.700,-	370.495.871,-	83,65
1	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	442.911.700,-	370.495.871,-	83,65
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		871.951.000,-	722.640.456,-	82,88
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	871.951.000,-	722.640.456,-	82,88
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		13.140.000,-	13.140.000,-	100
1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	13.140.000,-	13.140.000,-	100



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan arah strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Tahun 2019 - 2023 dan berdasarkan capaian IKU, merupakan hasil dari kerjasama dan partisipasi semua komponen. Keberhasilan yang dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara target yang belum tercapai diharapkan perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Disampaikan pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan secara mandiri mencapai Nilai 85,93 atau mencapai 102% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu Nilai 84. Target realisasi PMA dan PMDN Tahun 2023 mencapai Rp.16,45 Triliun, atau mencapai 161% dari Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp.10,17 Triliun. Sedangkan Target Nasional untuk realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.14,55 Triliun, atau mencapai 113% dari target nasional.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:



1. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target Nilai 84 dan dapat dicapai Nilai 85,93 atau sebesar 102%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 3,77%, dari tahun 2022 yang hanya mencapai nilai 82,81.

Survey Tahun 2023 dilaksanakan secara mandiri berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Pelayanan Publik. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Nilai Keberhasilan capaian tujuan sasaran yang dicerminkan pada capaian RPJMD dan Indikator Kinerja Utama yang ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung.

2. Target Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Rp. 10,17 Triliun dapat dicapai sebesar Rp.16,45 Triliun atau mencapai 161% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 15,4% dari Tahun 2022, yang hanya mencapai Rp.14,25 T. Hal ini tidak terlepas dari program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung yang telah dilaksanakan.

Perlu menjadi perhatian dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan antara lain Perlu ditingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan regulasi yang menghambat investasi serta perlunya memaksimalkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan para pelaku usaha dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita dan keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekian dan Terima Kasih.

Makassar, Februari 2024
Plh. KEPALA DPMPSTSP PROV. SULSEL,

IDHAM KADIR, S.Sos., M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19790113 200003 1 002